

SKRIPSI

DETERMINAN FISCAL STRESS DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN

disusun dan diajukan oleh

MUH. MU'MIN MENDONG
A011191153



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

DETERMINAN FISCAL STRESS DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Disusun dan diajukan oleh

MUH. MU'MIN MENDONG
A011191153



Kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

DETERMINAN FISCAL STRESS DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

MUH. MU'MIN MENDONG
A011191153

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Makassar, 25 Juli 2023

Pembimbing I



Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19770913 200212 2 002

Pembimbing II



Dr. Mirzalina Zaenal, SE., M.S.E.
NIP. 19870111 201404 2 001

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

SKRIPSI

DETERMINAN FISCAL STRESS DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Disusun dan diajukan oleh :

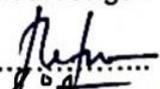
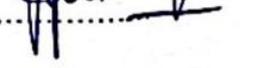
MUH. MU'MIN MENDONG
A011191153

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi

Pada tanggal 15 Agustus 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,
Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®.	Ketua	1..... 
2	Dr. Mirzalina Zaenal, SE., M.S.E.	Sekretaris	2..... 
3	Dr. Sanusi Fattah, SE., M.Si., CSF., CWM®.	Anggota	3..... 
4	Dr. Indraswati T.A. Reviane, SE., MA., CWM®.	Anggota	4..... 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Sabir, SE., M.Si., CWM®
NIP. 19740715 200212 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : **Muh. Mu'min Mendong**
NIM : A011191153
Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

"Determinan Fiscal Stress di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan"

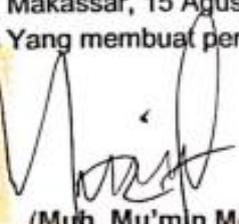
Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 15 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan




(Muh. Mu'min Mendong)

NIM. A011191153

PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai suri tauladan bagi seluruh umatnya.

Skripsi dengan judul "Determinan Fiscal Stress di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan" disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, serta saran-saran dari berbagai pihak.

Penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat orang tua saya, untuk Alm. Bapak Mendong dan Ibu Sumarti, sosok orang tua yang kebaikannya tak mampu diukur dengan apapun. Terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan pengorbanan tak terhingga, serta do'a yang tak hentinya dipanjatkan kepada penulis. Rasa terima kasih juga kepada kakak dan adik tercinta serta yang lainnya atas dukungan baik dalam bentuk material maupun non material.

Dalam kesempatan ini, penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih tak terhingga atas seluruh bantuannya, yakni kepada:

1. Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Sabir SE., M.Si., CWM®. selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi dan Ibu Dr. Fitriwati, SE., M.Si. selaku Sekretaris Departemen Ilmu Ekonomi. Terima kasih atas segala bantuan dan motivasi yang senantiasa diberikan hingga penulis dapat menyelesaikan studi di Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin.
4. Ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., CWM®. selaku Pembimbing I sekaligus penasehat akademik peneliti, beserta Ibu Dr. Mirzalina Zaenal, SE.,

M.S.E. selaku pembimbing II penulis. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada peneliti. Terima kasih sebesar-besarnya atas kesabaran dan nasehat yang diberikan kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini serta permohonan maaf yang sebesar-besarnya bilamana selama proses bimbingan skripsi peneliti secara tidak sengaja melakukan kesalahan yang menyinggung perasaan Ibu.

5. Bapak Dr. Sanusi Fattah, SE, M.Si., CSF., CWM®. dan Ibu Dr Indraswati T.A. Reviane, SE., MA., CWM®. selaku dosen penguji, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan serta kritik dan saran yang membangun dalam menyelesaikan skripsi. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah memberikan ilmu pengetahuan, arahan, bimbingan dan nasihat kepada peneliti selama menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
6. Segenap Pegawai Akademik, Kemahasiswaan dan Perpustakaan E-Library Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan studi.
7. Keluarga besar UKM LDM Darul 'Ilmi FEB-UH dan KSEI FoSEI Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah memberikan pengaruh positif kepada peneliti selama berproses di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, serta menjadi tempat belajar bagi peneliti utamanya di bidang agama dan ekonomi islam. Serta *Halaqah Tarbiyah* Al-Fatih 2019 atas segala ilmu dan dukungannya selama ini untuk peneliti.
8. Teman-teman "GRIFFINS" Ilmu Ekonomi 2019, terima kasih atas kebersamaannya, tetap kompak dan tetap semangat. Semoga semuanya segera meraih gelar SE secepatnya tanpa terkecuali, Aamiin.
9. Seluruh sahabat seperjuangan yang sama-sama mengejar impiannya masing-masing sebagai saksi perjuangan peneliti dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang sabar dalam mendengarkan segala keluh kesah peneliti dan atas segala dukungan dan bantuan yang tak terhitung sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

10. Kepada semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, yang dengan tulus memberikan arahan dan motivasi, serta doa sehingga atas izin Allah SWT skripsi ini dapat terselesaikan.

Akhir kata, peneliti menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, masih banyak kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan saran dan kritik bagi pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Peneliti juga mengharapkan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan pengetahuan bagi kita semua. *Aamiin ya Rabbal 'Alamiin,*

Makassar, Juli 2023

Muh. Mu'min Mendong

ABSTRAK

DETERMINAN FISCAL STRESS DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muh. Mu'min Mendong
Retno Fitrianti
Mirzalina Zaenal

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2008-2021. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Data-data tersebut kemudian ditabulasikan ke dalam struktur data panel yaitu gabungan antara data yang berbentuk *time series* dan *cross section* dalam bentuk tahunan. Penelitian ini menggunakan data 20 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan untuk kemudian dianalisis dengan metode Teknik Analisis Regresi Data Panel dengan pendekatan *Fixed Effect*. Hasil empiris membuktikan bahwa seluruh variabel determinan yang terdiri dari Belanja Modal, DAU, dan pertumbuhan ekonomi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* di Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara secara parsial, variabel Belanja Modal dan DAU memiliki pengaruh positif terhadap *fiscal stress* dengan tingkat pengaruh signifikan. Sedangkan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap *fiscal stress*. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan mampu memaksimalkan pengelolaan anggaran pendapatan secara efektif guna penyediaan pelayanan publik, meminimalisir ketergantungan kepada pemerintah pusat, mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan bersifat inklusif, dan meningkatkan pengawasan keuangan kabupaten/kota agar tepat sasaran sehingga terus berjalan dengan efektif dan efisien dalam upaya meminimalisir tingkat *fiscal stress*.

Kata Kunci:

Fiscal Stress, Sulawesi Selatan, Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

DETERMINANTS OF FISCAL STRESS IN DISTRICTS/CITIES OF SOUTH SULAWESI PROVINCE

Muh. Mu'min Mendong
Retno Fitrianti
Mirzalina Zaenal

This study aims to analyze the effect of Capital Expenditures, General Allocation Funds (DAU), and Economic Growth on fiscal stress in regencies/cities in South Sulawesi Province during the 2008-2021 period. This research is a quantitative type of research using secondary data obtained from the Central Bureau of Statistics of South Sulawesi Province and the Directorate General of Fiscal Balance (DJPB) Ministry of Finance of the Republic of Indonesia. These data are then tabulated into a panel data structure, which is a combination of data in the form of time series and cross-sections in annual form. This study used data from 20 districts/cities in South Sulawesi Province to then be analyzed using the Panel Data Regression Analysis Technique with the Fixed Effects approach. Empirical results prove that all determinant variables consisting of Capital Expenditure, DAU, and economic growth simultaneously have a significant effect on fiscal stress in South Sulawesi Province. While partially, the Capital Expenditure and DAU variables have a positive effect on fiscal stress with a significant level of influence. While the economic growth variable hurts fiscal stress. Therefore, district/city governments in South Sulawesi Province are expected to be able to maximize effective management of revenue budgets for the provision of public services, minimize dependency on the central government, encourage quality and inclusive economic growth, and improve district/city financial oversight so that they are on target. so that it continues to run effectively and efficiently to minimize the level of fiscal stress.

Keywords:

Fiscal Stress, South Sulawesi, Capital Expenditure, General Allocation Fund, Economic Growth

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Tinjauan Teoritis	10
2.1.1. Teori Perpajakan	10
2.1.2. Teori Fiskal.....	14
2.1.3. <i>Fiscal Stress</i>	16
2.1.4. Belanja Modal.....	18
2.1.5. Dana Alokasi Umum.....	20
2.1.6. Pertumbuhan Ekonomi	22
2.2. Hubungan Antar Variabel	24
2.2.1. Hubungan Belanja Modal dengan <i>Fiscal Stress</i>	24
2.2.2. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan <i>Fiscal Stress</i>	25
2.2.3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan <i>Fiscal Stress</i>	26
2.3. Penelitian Terdahulu.....	27
2.4. Kerangka Pikir Penelitian.....	31

2.5. Hipotesis Penelitian	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Rancangan Penelitian.....	33
3.2. Jenis dan Sumber Data	33
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	34
3.4. Metode Analisis Data.....	34
3.5. Definisi Operasional Variabel.....	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	45
4.2. Perkembangan Umum Variabel Penelitian	45
4.2.1. Perkembangan <i>Fiscal Stress</i>	45
4.2.2. Perkembangan Belanja Modal.....	47
4.2.3. Perkembangan Dana Alokasi Umum	48
4.2.4. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi	49
4.3. Metode Estimasi Regresi Data Panel	50
4.3.1. Common Effect Model	50
4.3.2. Fixed Effect Model.....	51
4.3.3. Random Effect Model	51
4.4. Pemilihan Regresi Data Panel	52
4.4.1. Uji Chow	52
4.4.2. Uji Hausman.....	52
4.4.3. Uji Lagrange Multiplier	53
4.5. Uji Hipotesis	54
4.5.1. Uji t (Uji Parsial).....	54
4.5.2. Uji F (Uji Serentak)	60
4.5.3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)	60
4.6. Uji Asumsi Klasik	61
4.6.1. Uji Multikolinearitas.....	61
4.6.2. Uji Heteroskedastisitas	62
4.7. Pembahasan	63
4.7.1. Pengaruh Belanja Modal Terhadap <i>Fiscal Stress</i>	64
4.7.2. Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap <i>Fiscal Stress</i>	67
4.7.3. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap <i>Fiscal Stress</i>	68
BAB V PENUTUP	72
5.1. Kesimpulan.....	72

5.2. Saran.....	73
5.3. Keterbatasan Penelitian.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	75
LAMPIRAN	79

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Hasil Regresi Panel dengan Common Effect.....	50
Tabel 4.2 Hasil Regresi Panel dengan Fixed Effect	51
Tabel 4.3 Hasil Regresi Panel dengan Random Effect.....	51
Tabel 4.4 Hasil Uji Chow.....	52
Tabel 4.5 Hasil Uji Hausman.....	53
Tabel 4.6 Hasil Uji Lagrange Multiplier.....	54
Tabel 4.7 Output Uji t.....	55
Tabel 4.8 Output Uji F.....	60
Tabel 4.9 Koefisien Determinasi (R^2)	61
Table 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas (<i>Correlation</i>).....	62
Table 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas - <i>Glejser</i>	63
Table 4.12 Interpretasi Uji <i>Glejser</i>	63

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Data Perbandingan Pajak Perkapita Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2021	2
Gambar 1.2 Data PAD, DAU, dan DAK Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2015-2021	5
Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian	31
Gambar 4.1 Pajak Perkapita Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2022	46
Gambar 4.2 Belanja Modal Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2022.....	47
Gambar 4.3 DAU Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2018-2022.....	48
Gambar 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Periode 2018-2022.....	49

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Statistik Deskriptif	79
Lampiran 2. Tabulasi Data Variabel.....	82
Lampiran 3. Biodata Peneliti.....	98

BAB I

PENDAHULUAN

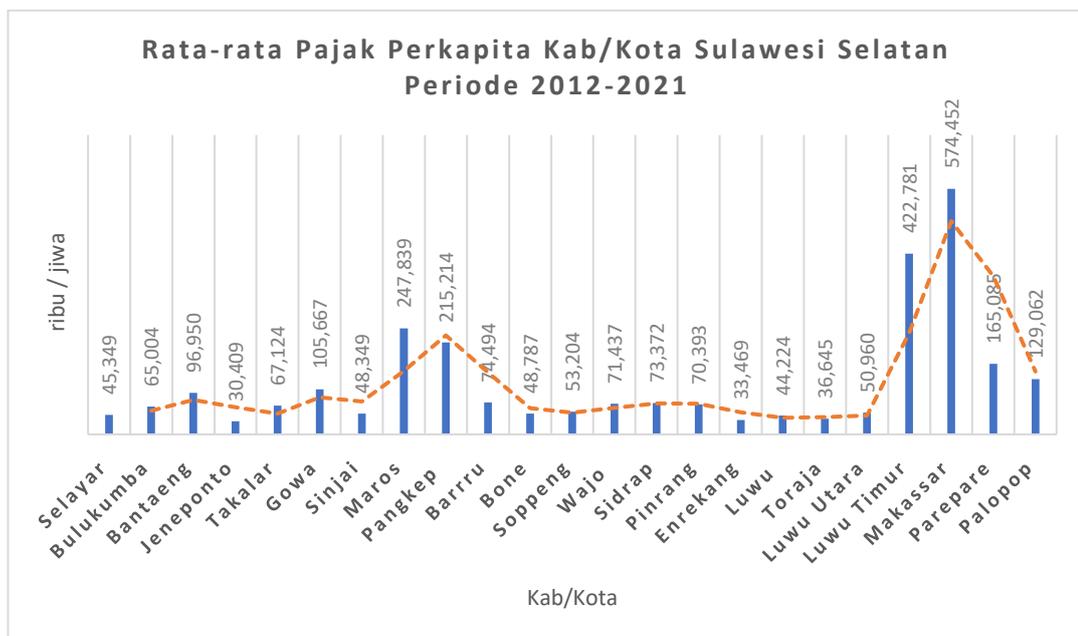
1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 (Widjaja, 2009). Dalam otonomi daerah, beberapa jenis pelayanan umum diserahkan kepada pemerintah daerah yang dianggap lebih memahami kebutuhan masyarakat di daerahnya daripada pemerintah pusat. Namun, salah satu konsekuensi dari otonomi daerah yaitu pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat daerah dan dalam melaksanakan pembangunan daerah. Oleh karena itu, otonomi daerah perlu didukung melalui peningkatan kemampuan fiskal daerah (BPK-RI, 2020).

Arnett (2011) menyatakan bahwa *fiscal stress* merupakan ketidakmampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhannya dari kewajiban keuangan jangka pendek atau jangka panjang, serta ketidakmampuan untuk meningkatkan pendapatan atau menyediakan barang dan jasa. Penyebab *fiscal stress* yaitu dari terbatasnya penerimaan anggaran untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kemandirian daerah. Jika *fiscal stress* tinggi maka dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah dalam mengelola dan mengalokasikan anggaran. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk melakukan berbagai terobosan guna memenuhi pembiayaan untuk menjalankan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik.

Banyak yang menyandingkan antara *fiscal stress* (tekanan fiskal) dengan

fiscal imbalance, namun *fiscal stress* dalam penelitian ini lebih ditekankan pada tingkat ketergantungan pemerintah terhadap pajak yang diterima dari penduduknya atau tingkat pajak perkapita. Sedangkan *fiscal imbalance* mengacu pada ketidakseimbangan keuangan antara penerimaan dan pengeluaran pemerintah baik positif maupun negatif. Pajak Perkapita merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Hal ini menunjukkan kontribusi setiap penduduk pada pendapatan perpajakan suatu daerah. Shamsub & Akoto (2004) mengasumsikan pada penelitiannya bahwa upaya pajak adalah salah satu indikator yang baik dalam mengukur *fiscal stress*.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan (data diolah)

Gambar 1.1 Data Perbandingan Rata-rata Pajak Perkapita Kab/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2012-2021

Pada tahun 2012-2021 rata-rata pajak perkapita tertinggi berada pada Kota Makassar dimana angka pajak perkapita mencapai 574,452 ribu per jiwa. Tahun 2021 pendapatan pajak dari hotel adalah penyumbang pendapatan pajak terbesar bagi Kota Makassar. Hal ini juga dapat dilihat ketimpangan pajak

perkapita antar Kota Makassar dengan daerah lain yang disebabkan karena kegiatan perekonomian di Kota Makassar relatif besar sehingga menimbulkan basis pajak yang besar. Sedangkan daerah yang pajak perkapitanya paling rendah adalah Kabupaten Jeneponto dengan pajak perkapita 30,409 per jiwa. Rendahnya angka tersebut disebabkan karena masih rendahnya potensi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Jeneponto.

Skidmore & Scorsone (2011) merumuskan secara umum pengembangan ukuran yang akurat dari kondisi fiskal suatu pemerintah daerah dalam 2 (dua) kategori. Pertama, adalah kondisi terjadinya *fiscal stress* yang sebagian besar ditentukan oleh keputusan pemerintah daerah, misalnya pengelolaan anggaran keuangan yang buruk sehingga dapat menyebabkan tantangan fiskal yang signifikan. Kedua adalah menempatkan *fiscal stress* pada keadaan ekonomi yang menyebabkan krisis. Pengukuran yang dilakukan antara biaya penyediaan layanan publik dan pendapatan daerah yang dihasilkan.

Shamsub & Akoto (2004) menyimpulkan ke dalam 3 (tiga) penyebab terjadinya *fiscal stress*, yaitu: (1) menekankan bahwa terjadinya penurunan dan resesi dapat berdampak terhadap kondisi siklus dan pertumbuhan ekonomi. McGranahan (1999) dari Shamsub & Akoto (2004) menunjukkan bahwa fluktuasi siklus ekonomi diukur dengan tingkat pengangguran suatu negara, (2) menekankan bahwa kurangnya insentif bisnis dan kemunduran sektor industri sebagai penyebab utama *fiscal stress*, akan tetapi Yu & Korman (1987) dari Shamsub & Akoto (2004) mengemukakan bahwa penurunan industri juga dapat mengakibatkan pendapatan pajak menurun, namun disisi lain pelayanan jasa justru mengalami peningkatan sehingga dapat menyebabkan *fiscal stress*, dan (3) menganggap bahwa *fiscal stress* sebagai fungsi dari faktor fiskal politik dan faktor keuangan yang tidak terkendali.

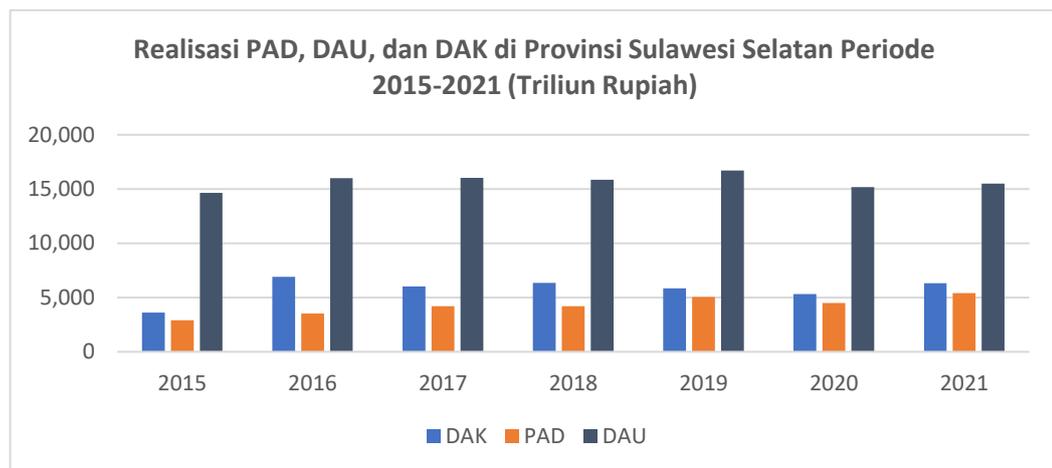
Terjadinya *fiscal stress* tidak hanya diindikasikan dipengaruhi oleh pendapatan, namun juga dipengaruhi oleh struktur belanja daerah. Anggaran belanja modal tentu akan semakin meningkat setiap tahunnya, apabila tidak adanya penerimaan daerah yang memadai untuk mendanai belanja daerah, maka dapat menimbulkan adanya *fiscal stress*. Perubahan pengeluaran akan lebih banyak disebabkan oleh tuntutan peningkatan pelayanan publik yang ditunjukkan pada peningkatan alokasi belanja guna kepentingan pelayanan publik secara langsung dalam hal ini belanja modal (Muda, 2012).

Peningkatan belanja modal untuk pembangunan secara langsung dapat meningkatkan anggaran belanja daerah. Pada belanja modal diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, dan juga untuk berbagai jasa yang terkait dengan penyediaan layanan kepada masyarakat. Dengan peningkatan pada belanja modal yang tinggi kemudian pada saat yang sama pendapatan pemerintah daerah juga terbatas, maka dalam hal ini akan mengakibatkan terjadinya *fiscal stress* (hovsky, 2003). *Fiscal stress* juga dapat terjadi apabila pendapatan pemerintah daerah turun tetapi permintaan layanan pemerintah daerah justru mengalami peningkatan (Chapman, 1998).

Dalam mendukung kebijakan pemerintah daerah, dimana kebijakan yang beralih dari sistem sentralisasi pada sistem desentralisasi, sehingga diharapkan pemerintah daerah mampu menghasilkan semua potensi maupun kapasitas fiskalnya dalam upaya mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan menjadikan daerah otonom menjadi lebih mandiri. Dalam hal ini pemerintah daerah berupaya mengoptimalkan potensi PAD melalui peningkatan pajak sebagai bagian utama dalam penyusunan APBD dan upaya dalam meminimalisir ketergantungan penerimaan dari pemerintah pusat.

Dalam menanggapi kesenjangan yang terjadi pemerintah pusat

mengeluarkan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai pengeluaran pembangunannya. Dalam hal ini ditujukan untuk meminimalkan adanya disparitas fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar 1.2 Data PAD, DAU, dan DAK Provinsi Sulawesi Selatan Periode 2015-2021

Salah satu pendapatan daerah yaitu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU), berdasarkan data pada **Gambar 1.2** di atas menunjukkan bahwa Pendapatan Daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2015-2021 tidak stabil, namun Dana Alokasi Umum (DAU) masih mendominasi dibandingkan dari Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Dalam hal ini pada tahun 2018 menunjukkan alokasi pendapatan daerah Sulawesi Selatan sebesar Rp 43.503,05 miliar meningkat 11,38 persen dari periode tahun 2016 sebesar Rp 39.059,14 miliar. Namun, peningkatan alokasi Pendapatan Daerah diikuti dengan meningkatnya alokasi belanja, total target belanja pemerintah daerah Sulawesi Selatan untuk tahun 2018 sebesar Rp 44.930,97 miliar yang mengalami pertumbuhan sebesar 10,24 persen dari tahun 2016. Komposisi pendapatan

dalam APBD pemerintah daerah Sulawesi Selatan untuk tahun 2018 masih terbelang mendominasi dari dana perimbangan mencapai 77,17 persen khususnya pada DAU dan DAK, hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan pemerintah daerah Sulawesi Selatan terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi, sehingga hal ini dapat menimbulkan adanya *fiscal stress* (Kemenkeu, 2018).

Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penentu terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Namun, indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memperlihatkan keadaan kemakmuran masyarakatnya. Pertumbuhan ekonomi hanya menunjukkan bagaimana “kue pembangunan” diperbesar namun belum menunjukkan bagaimana didistribusikan secara merata dalam menggapai kesejahteraan masyarakat (Firstanto, 2015).

Muryawan & Sukarsa (2016) menyatakan bahwa *fiscal stress* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun di mediasi kinerja keuangan daerah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2012-2021 mengalami peningkatan, yaitu tahun 2012 sebesar Rp202.184,59 miliar menjadi Rp343.402,51 miliar tahun 2021 (BPS, Sulsel). Perkembangan ekonomi yang baik ini diharapkan mampu meningkatkan sisi pendapatan daerah khususnya dalam hal pajak daerah dan retribusi daerah yang akan mengurangi angka *fiscal stress* di wilayah Sulawesi Selatan.

Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang membahas mengenai determinan *fiscal stress*. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Hadar et al (2020) mengindikasikan bahwa secara simultan variabel pendapatan asli daerah, belanja daerah, dan Produk Domestik Bruto (PDRB) berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress* di Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Periode

2014-2018. Selanjutnya, Icoh et al (2021) mengungkapkan bahwa variabel pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif secara signifikan terhadap *fiscal stress* di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2019.

Penelitian terkait *fiscal stress* sangat penting bagi tingkat daerah, pasalnya dalam kondisi saat ini pemerintah daerah dituntut untuk mandiri dalam membiayai pelayanan publik dan berbagai program daerah. Suatu pemerintah daerah tidak lagi terus bergantung terhadap pemerintah pusat dengan mampu mengoptimalkan penerimaan sembari menutup anggaran pengeluaran yang setiap tahun mengalami peningkatan (Heriansyah, 2019). Berdasarkan penjelasan dan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa seiring perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah yang mencakup empat variabel yang asumsikan di atas nyatanya belum mampu memberikan dampak terhadap ketergantungan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan kemampuan pemerintah daerah dalam menyesuaikan anggarannya.

Dengan demikian, berdasarkan penjabaran latar belakang yang ada sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress* pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Pada dasarnya mengingat bahwa provinsi ini merupakan salah satu representasi utama perekonomian Indonesia timur. Dalam hal ini, hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberi penjelasan terkait fenomena tekanan fiskal yang terjadi pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan selama periode 2008-2021. Sehingga perlu di ketahui bahwa Belanja Modal, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi terdapat pengaruh dari terjadinya *fiscal stress*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian dalam skripsi ini sebagai berikut:

1. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
2. Apakah Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini, yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Modal terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi:

1. Pemerintah

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna dalam memahami berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Sulawesi Selatan agar dapat diketahui kebijakan yang bisa diterapkan untuk mengatasi masalah tekanan fiskal yang ada, serta sebagai bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan agar

mempertimbangkan *fiscal stress* dalam pengawasan penyerapan anggaran daerah.

2. Pengembangan Ilmu

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan ekonomi khususnya ekonomi pembangunan dan bidang keuangan daerah. Dalam hal ini, dapat melengkapi kajian mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan meninjau kondisi *fiscal stress* dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Peneliti

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menambah wawasan yang lebih luas atau pengetahuan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi *fiscal stress* pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan serta sebagai bahan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian topik *fiscal stress* di daerah lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Teori Perpajakan

a. Pengertian Pajak

Pajak dalam UU RI No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yakni, perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh individu atau badan dengan sifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung dan dimanfaatkan untuk kepentingan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Dr. Soeparman Soemahamidjaya mendefinisikan pajak sebagai iuran wajib bagi masyarakat yang berupa uang ataupun barang yang dipungut oleh pemerintah dengan berbagai aturan hukum yang berlaku guna menutup biaya produksi barang dan jasa dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan P.J.A. Andriani, menjelaskan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan undang-undang dengan tidak memperoleh prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

b. Fungsi Pajak

1. Fungsi Anggaran

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan keuangan negara dengan mengumpulkan uang dari wajib pajak ke kas negara guna membiayai pembangunan atau pengeluaran negara lainnya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Seperti pajak digunakan sebagai alat untuk mendorong kegiatan ekspor barang.

3. Fungsi Pemerataan

Pajak dilakukan dengan menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.

4. Fungsi Stabilitas

Pajak sebagai salah satu penerimaan negara dapat dilakukan untuk menjalankan kebijakan ekonomi. Seperti dengan mengatasi inflasi, pemerintah menetapkan pajak yang tinggi, maka jumlah uang yang beredar dapat dikurangi.

c. Jenis-Jenis Pajak

Beberapa pengelompokan pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah dari wajib pajak, yang digolongkan berdasarkan sifat, instansi pemungut, objek pajak dan subjek.

1. Berdasarkan sifat

- Pajak Tidak Langsung, pajak ini yang hanya diberikan kepada wajib pajak apabila melakukan perbuatan tertentu. Contohnya,

pajak penjualan atas barang mewah, pajak ini hanya diberikan jika wajib pajak menjual barang mewah.

- Pajak Langsung, pajak yang diberikan secara bertahap kepada wajib pajak yang berlandaskan surat ketetapan pajak. Contohnya, Pajak Bumi dan Penghasilan dan Pajak Penghasilan.

2. Berdasarkan Lembaga Pemungutannya

- Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui instansi terkait, salah satunya Dirjen Pajak. Contohnya pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan.
- Pajak Daerah, pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas hanya pada rakyat daerah itu sendiri. Adapun pajak daerah terdiri sebagai berikut:
 - Pajak Provinsi, yakni pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat I, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
 - Pajak Kabupaten/Kota, yakni pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Tingkat II, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan.

3. Berdasarkan Objek dan Subjek Pajak

- Pajak Objektif, pajak yang pengambilannya berdasarkan objeknya,. Contohnya pajak impor, pajak kendaraan bermotor, dan lain-lain
- Pajak Subjektif, pajak yang pengambilannya secara subjektifnya. Contohnya, pajak kekayaan dan pajak penghasilan.

d. Teori-Teori Pemungutan Pajak

Hukum pajak didasarkan pada keadilan yang disebut sebagai asas pemungutan pajak. Dengan hal ini, terdapat teori dasar yang menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak yakni:

1. Teori Asuransi, yaitu pada perjanjian asuransi diperlukan pembayaran premi yang dimaksudkan sebagai pembayaran atas usaha melindungi individu dari segala kepentingannya, seperti keselamatan atau keamanan harta bendanya.
2. Teori Kepentingan, yaitu memperhatikan beban pajak yang harus dipungut dari masyarakat yang didasarkan pada kepentingan setiap individu pada tugas pemerintah termasuk perlindungan jiwa dan hartanya.
3. Teori Gaya Pikul, yaitu bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada masyarakat berupa perlindungan jiwa dan harta bendanya. Oleh karenanya, untuk kepentingan perlindungan maka masyarakat dapat membayar pajak menurut gaya pikul seseorang.
4. Teori Bakti, yaitu teori kewajiban pajak mutlak. Teori ini berdasarkan negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak. Di sisi lain, masyarakat menyadari bahwa pembayaran pajak sebagai suatu kewajiban untuk membuktikan tanda buktinya terhadap negara. Dalam hal ini dasar hukum pihak terletak pada hubungan masyarakat dengan negara.
5. Teori Asas Daya Beli, yaitu penyelenggaraan kepentingan masyarakat yang dianggap sebagai dasar keadilan pemungutan

pajak yang bukan kepentingan individu atau negara, sehingga lebih menitikberatkan pada fungsi mengatur.

2.1.2. Teori Fiskal

Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang disingkat APBN guna mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan laju pembangunan ekonomi yang dikehendaki yang umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan (Wayan Sudirman, 2011: 2). Kebijakan fiskal menjadi penting karena dikaitkan dengan suatu proporsi yang menyatakan bahwa dengan penetapan pajak dalam jumlah tertentu pada wajib pajak dapat meningkatkan pendapatan pemerintah sehingga pemerintah menjadi lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Berdasarkan (Ridwan & Nawir, 2021) menyatakan kebijakan fiskal adalah kebijakan yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka memperoleh penerimaan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemerintah guna membiayai dananya tersebut dalam rangka melaksanakan pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan penerimaan atau pengeluaran.

Teori ekonomi Keynesian yang diusulkan oleh John Maynard Keynes pada tahun 1930-an berfokus pada pentingnya kebijakan fiskal dalam meningkatkan tingkat pengeluaran agregat atau bertindak melawan arah siklus bisnis. Keynes berpendapat bahwa perekonomian tidak selalu berada dalam keseimbangan dan terdapat kemungkinan terjadinya krisis yang disebabkan oleh pasokan uang dan kekurangan permintaan agregat. Dalam teori ini mengemukakan bahwa pemerintah dapat dan seharusnya mengimplementasikan kebijakan fiskal untuk mengatasi ketidakseimbangan dalam ekonomi, terutama dalam situasi resesi atau depresi. Keynesianisme

menganjurkan penggunaan pengeluaran publik atau pada proyek infrastruktur dalam hal ini meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk merangsang permintaan agregat dan menstabilkan upah selama kemerosotan ekonomi.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengarahkan ekonomi melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah. Dalam kajian Ridwan & Nawir (2021) beberapa pendapat para ahli mengenai kebijakan fiskal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Sadono Sukirno (2003), kebijakan fiskal adalah Langkah-langkah pemerintah guna membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pengeluarannya untuk mengatasi permasalahan ekonomi.
2. Berdasarkan Tulus TH Tambunan, kebijakan memiliki dua prioritas, pertama mengatasi defisit anggaran APBN dan masalah APBN lainnya. Kedua, mengatasi stabilitas ekonomi makro terkait dengan pertumbuhan ekonomi, inflasi, kesempatan kerja dan neraca pembayaran.
3. Berdasarkan Nopirin (1987), kebijakan fiskal terdiri dari perubahan pengeluaran pemerintah atau perpajakan dengan tujuan memengaruhi besar serta susunan permintaan agregat.

Secara garis besar, fiskal dalam keuangan daerah dikategorikan menjadi dua, yakni pengelolaan penerimaan daerah dan pengelolaan pengeluaran daerah. kedua komponen tersebut sangat menentukan kedudukan suatu pemerintahan daerah dalam rangka melaksanakan otonomi. Implementasi desentralisasi fiskal dan otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,

memberikan kewenangan yang luas dan nyata kepada pemerintah daerah untuk mengelola dan mengatur sumber daya sesuai dengan kepentingan masyarakat daerahnya. Pemerintah daerah berwenang untuk menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Instrumen kebijakan fiskal yaitu penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak apabila mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Apabila terjadi penurunan pajak maka kemampuan daya beli masyarakat dapat meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Namun sebaliknya, terjadinya kenaikan pajak dapat menurunkan daya beli masyarakat serta secara umum menurunkan output. Dari adanya perubahan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada permintaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi, pola alokasi sumber daya, dan distribusi pendapatan.

2.1.3. Fiscal Stress

Bradbury (2014) mendefinisikan bahwa *fiscal stress* adalah konsep yang berusaha mengukur sejauh mana pemerintah daerah berada dalam bahaya krisis fiskal yang memerlukan adanya campur tangan oleh pemerintah pusat, terutama tindakan yang dapat mengurangi pengelolaan keuangan suatu daerah. *Fiscal stress* pada pemerintah daerah dapat menjadi hasil dari sejumlah faktor, termasuk kondisi ekonomi yang buruk atau pengelolaan kebijakan fiskal yang buruk. Sedangkan Muryawan & Sukarsa (2016) menyimpulkan bahwa *fiscal stress* merupakan tekanan yang terjadi disebabkan karena adanya keterbatasan penerimaan pendapatan anggaran pada pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan pelaksanaan kemandirian di daerahnya.

Arnett (2011) mengelompokkan 5 (lima) kategori besar dalam pengukuran

fiscal stress pada tingkat pemerintah daerah, yaitu: (1) Defisit anggaran (*budget deficit*) yang merumuskan karena terlalu rendahnya suatu penerimaan daerah dan tingginya pengeluaran, (2) saldo anggaran akhir tahun yang tidak dicadangkan (*year-end unreserved budget balance*) dengan menunjukkan negara atau daerah dengan tingkat *fiscal stress* yang tinggi memiliki saldo anggaran yang rendah pada akhir tahun, (3) rendahnya atas kinerja penerimaan pemerintah daerah (*decline in state's revenues performance*) yang menunjukkan pengurangan pendapatan memiliki kondisi adanya *fiscal stress*, (4) peningkatan pajak tidak mutlak yang mempertahankan pengeluaran yang memiliki *trend* yang terus meningkat tanpa kenaikan pajak, serta (5) rasio keuangan (*financial ratio*) yang digunakan adalah rasio *leverage* dan kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkelanjutan.

World Bank merumuskan penyebab terjadinya *fiscal stress* yaitu disebabkan oleh adanya resesi ekonomi, akhir dari adanya dorongan pendapatan dan pengeluaran pemerintah pusat, meningkatnya biaya pelayanan publik, serta besarnya kebutuhan peningkatan infrastruktur dalam adanya urbanisasi (*World Bank, 2013*). Sedangkan *European Central Bank* mengungkapkan bahwa *fiscal stress* dapat disebabkan oleh faktor yang sangat berbeda. Salah satunya adalah fundamental fiskal yang lemah, tercermin dalam defisit dan tingkat utang yang menimbulkan risiko terhadap kesinambungan fiskal dengan bertanggung jawab secara langsung untuk memicu *fiscal stress* (*European Central Bank, 2014*).

Wang et al (2007) dalam Arnett (2011) mengungkapkan bahwa salah satu indikator keuangan yakni pajak perkapita yang dikonversi menjadi z-score merupakan pengukuran yang penting dari *fiscal stress*, dimana mencerminkan kemampuan pemerintah untuk terus bertahan beroperasi dalam kondisi ekonomi

yang sedang mengalami permasalahan keuangan. Pajak perkapita menilai beban pajak yang dibebankan pada masyarakat di suatu daerah. Pemerintah daerah dengan keseimbangan fiskal yang stabil terus berupaya menyerap dampak negatif dari permasalahan fiskal tersebut. Secara finansial, *fiscal stress* dapat dikategorikan sebagai lemahnya kondisi keuangan (*worse financial position*). Beban pajak yang besar bagi masyarakat menunjukkan tingkat *fiscal stress* yang lebih tinggi (Prasetyo & Rahayu, 2019).

Lhutfi et al (2019) dalam hasil penelitiannya pada kota Yogyakarta dan Surakarta bahwa respons dari kedua kota tersebut terhadap *fiscal stress* yaitu: (1) pemerintah daerah berusaha meningkatkan PAD karena *fiscal stress* muncul disebabkan terbatasnya PAD untuk menutupi pengeluaran daerah. Semakin besar kemampuan daerah dalam mengoptimalkan PAD, maka semakin rendah pula dampak *fiscal stress* terhadap daerah. (2) pengurangan belanja daerah akan menanggapi *fiscal stress* dengan mendistribusikan belanja modal yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan mengurangi anggaran belanja sesuai dengan prioritas. (3) daerah akan mencairkan dana cadangan pada periode sebelumnya untuk digunakan dalam memenuhi kebutuhan daerah. (4) pemberian pinjaman daerah yaitu kredit dapat diperoleh dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. (5) penurunan pelayanan masyarakat dengan mengurangi jam kerja, menghentikan layanan atau memberhentikan pekerja dan penghentian sementara.

2.1.4. Belanja Modal

Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada Kelompok Belanja Administrasi Umum (Halim,

2004). Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 53 ayat 1 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, Gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

Belanja modal dimaksudkan guna memperoleh aset tetap Pemerintah Daerah yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Belanja modal bukan hanya pengeluaran yang menambah aset tetap namun harus memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun. Belanja modal adalah pengeluaran yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah serta akan menambah belanja bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan. Belanja modal memiliki karakteristik spesifik yang menunjukkan adanya berbagai pertimbangan dalam pengalokasiannya (Halim, 2001).

Berdasarkan Kementerian Keuangan bahwa belanja modal merupakan pengeluaran untuk pembayaran aset tetap atau menambah aset tetap yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dimaksudkan untuk dipergunakan oleh masyarakat atau publik, dimana tidak dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat / Pemda. Adapun belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 12 Tahun 2019 meliputi:

- a. Belanja Modal Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh guna dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dalam kondisi siap dipakai.
- d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki atau dikuasai dan dalam kondisi siap dipakai.
- e. Belanja Modal Lainnya, pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam akun belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan, jalan, irigasi, dan lain-lain. Hal ini termasuk dalam belanja modal meliputi kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang-barang untuk museum.
- f. Belanja Modal BLU (Badan Layanan Umum), pengeluaran untuk pengadaan atau perolehan yang dipergunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

2.1.5. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum dialokasikan untuk tujuan pemerataan sehingga dapat memperkecil selisih antara daerah maju dan belum berkembang, dengan memperhatikan potensi daerah itu sendiri, luas wilayah, geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) bersifat *block grant*, yang memungkinkan daerah membelanjakan

dananya secara bebas yang disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan daerah. Bagian dari dana yang dialokasikan sebesar 10 persen untuk Provinsi dan 90 persen untuk kabupaten/kota (Widjaja, 2005). Dana Alokasi Umum adalah dana yang disediakan oleh APBN dan dialokasikan untuk kepentingan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan belanja.

Berdasarkan Kementrian Keuangan (2016) Dana Alokasi Umum dialokasikan dalam 3 (tiga) komponen diantara-Nya: (1) Dana Alokasi Umum didistribusikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, (2) besaran dari Dana Alokasi umum ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN, dan (3) Jumlah dari DAU untuk wilayah provinsi dan untuk wilayah kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan dengan keseimbangan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Variabel DAU dilihat pada komponen variabel kebutuhan fiskal yang diimplementasikan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari jumlah penduduk, luas daerah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Halim (2014) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana hibah negara kepada pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan APBN dan dialokasikan dalam rangka pemerataan kinerja keuangan antar daerah dalam mendanai kebutuhan pelaksanaan desentralisasi daerah. Dana Alokasi Umum menyasar wilayah Provinsi dan kabupaten/kota. Distribusi DAU untuk daerah Provinsi dan kabupaten/kota dijamin oleh keseimbangan kekuasaan antara Provinsi dan kabupaten/kota. DAU merupakan akumulasi dari alokasi dasar ditambah dengan celah fiskal. Alokasi dasar dalam hal ini yaitu

jumlah gaji PNS daerah, sedangkan celah fiskal meliputi selisih antara kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal (Kemenkeu, 2016).

2.1.6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kegiatan pembangunan dalam perekonomian yang menghasilkan produksi barang dan jasa dalam masyarakat serta peningkatan kekayaan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi mengukur kinerja pembangunan ekonomi dari satu periode ke periode lainnya. Dalam hal ini meningkatkan kemampuan negara atau daerah untuk menghasilkan barang dan jasa. Kapasitas peningkatan ini disebabkan adanya penambahan faktor produksi, baik secara kuantitas maupun kualitas. Investasi meningkatkan barang modal dan teknologi yang digunakan. Selain itu, sumber daya manusia yang bekerja meningkat sebagai akibat dari perkembangan sumber daya manusia karena peningkatan pendidikan dan kualifikasi (Sukirno, 2011).

Berdasarkan Muryawan & Sukarsa (2016) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan kemampuan suatu daerah dalam memproduksi atau menyediakan kebutuhan barang dan jasa kepada masyarakatnya sehingga memungkinkan kesejahteraan masyarakat meningkat. Pada pertumbuhan ekonomi dapat menjelaskan atau mengukur pencapaian dari perkembangan suatu perekonomian. Dalam perekonomian yang sebenarnya pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan ekonomi secara fisik yang terjadi di suatu wilayah, misalnya pertambahan jumlah sarana pendidikan, infrastruktur, pertambahan jumlah dan produksi barang industri, penambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi, dan berbagai perkembangan lainnya.

Menurut keynesianisme, pada situasi di mana ekonomi mengalami resesi, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik seperti pengeluaran

infrastruktur dan program sosial untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal, seperti pengaturan pajak dan pengeluaran. Jika pemerintah menurunkan pajak dan meningkatkan pengeluaran, hal tersebut dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi. Dengan demikian, dalam teori ini beranggapan bahwa campur tangan pemerintah dalam ekonomi menentukan pembangunan ekonomi dapat berjalan maksimal. Pandangannya bahwa guna menjamin pertumbuhan yang stabil maka diperlukan peranan pemerintah dalam pengelolaan perekonomian dalam hal perpajakan dan belanja pemerintah (Sukirno, 2011).

Model pertumbuhan Harrod-Domar dalam Ridwan & Nawir (2021) menekankan konsep tingkat pertumbuhan natural. Dimana laju pertumbuhan natural merupakan laju pertumbuhan yang berasal dari peningkatan angkatan kerja dan akan menjaga pengangguran pada tingkat yang konstan. Selain meninjau kuantitas faktor produksi tenaga kerja diperhitungkan juga kenaikan efisiensi dari pendidikan dan pelatihan. Pada model ini dapat menentukan berapa besarnya tabungan atau investasi yang digunakan untuk menjaga tingkat laju pertumbuhan ekonomi natural.

Rahman & Chamelia (2015) mendefinisikan bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh semua area usaha maupun jasa dalam satu wilayah, menerapkan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dwitayanti et al (2019) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebuah perkembangan kegiatan dalam membangun perekonomian suatu daerah yang disebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat dapat meningkat dan masyarakat lebih sejahtera.

2.2. Hubungan Antar Variabel

2.2.1. Hubungan Belanja Modal dengan *Fiscal Stress*

Dalam menghadapi otonomi daerah, pemerintah daerah dapat lebih meningkatkan pelayanan publiknya. Upaya tersebut terus mengalami perbaikan sepanjang dukungan dari tingkat pembiayaan daerah yang memadai. Alokasi belanja yang memadai guna peningkatan fasilitas publik diharapkan memberikan timbal balik baik berupa peningkatan penerimaan PAD, pungutan pajak, retribusi maupun penerimaan lainnya. Secara komprehensif, sebelum era otonomi daerah, pengaruh *fiscal stress* terhadap tingkat pengeluaran sesudah otonomi lebih besar daripada sebelum otonomi. Hal tersebut disebabkan karena lebih banyak tuntutan pelayanan publik yang ditunjukkan dengan peningkatan alokasi ataupun terjadi pergeseran belanja untuk kepentingan pelayanan publik secara langsung dalam hal ini belanja modal (Dongori,2006).

Implementasi Undang-Undang Otonomi Daerah diharapkan dapat memberikan motivasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD. Pemerintah daerah diharapkan menggali potensi yang ada di daerahnya sehingga PAD dapat diimplementasikan untuk membiayai belanja daerah dalam hal ini peningkatan pelayanan publik ataupun prasarana yang mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan teori pengeluaran pemerintah versi Keynes, peningkatan dalam pengeluaran pemerintah baik melalui program-program sosial dan layanan publik, pemerintah daerah dapat memicu peningkatan permintaan agregat di pasar. Hal ini dapat merangsang aktivitas ekonomi dan menggerakkan pertumbuhan yang dapat menurunkan tingkat *fiscal stress*.

Belanja modal seperti infrastruktur dalam jangka pendek akan memperbesar anggaran belanja daerah. Apabila tidak diimbangi dengan

penerimaan yang signifikan maka hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya *fiscal stress*. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Budi S. & Priyo H.A (2008) tentang *fiscal stress* yang menyatakan bahwa “semakin tinggi *fiscal stress* pada suatu daerah, maka semakin tinggi pula belanja pembangunan di daerah tersebut”. Shamsub & Akoto (2004) menyatakan bahwa pengeluaran yang tinggi di identik dengan *fiscal stress* yang tinggi begitu pun sebaliknya. Dalam hal ini mempengaruhi tingkat pendapatan daerah yang ketika pemerintah daerah menambah aset pengeluaran, dapat terjadi peningkatan volume *fiscal stress* di suatu daerah untuk menekankan pengeluaran aset mereka.

Dengan demikian, semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi pengeluaran pemerintah. Namun sebaliknya, semakin tinggi belanja modal maka semakin tinggi potensi penerimaan pemerintah yang dapat diharapkan di masa mendatang. Konsekuensinya, semakin tinggi belanja pembangunan tanpa diimbangi penerimaan yang tinggi kemungkinan suatu daerah mengalami *fiscal stress*. Semakin optimal pengelolaan keuangan pemeeintah dalam menyediakan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat, maka kondisi *fiscal stress* dapat membaik.

2.2.2. Hubungan Dana Alokasi Umum dengan *Fiscal Stress*

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota, yang dimaksudkan untuk mendanai *overspending* daerah. Defisit terjadi ketika realisasi biaya suatu daerah lebih tinggi dari pendapatan daerah. Oleh karena itu, untuk menutupi biaya daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dana transfer, salah satunya dialokasikan ke pemerintah kabupaten/kota dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU). Semakin banyak transfer DAU yang diterima dari pemerintah pusat, maka semakin rendah *fiscal*

stress pada pemerintah kabupaten/kota karena pemerintah daerah lebih mampu memenuhi kebutuhan daerah (Ulfa et al., 2021).

Berdasarkan Kementerian Keuangan bahwa DAU berfungsi sebagai *equalization grant* atau hibah pemerataan, yang dapat membantu pemerintah daerah mengatasi keterbatasan pendapatan dan kemampuan fiskal. Dengan menerima hibah pemerataan dari pemerintah pusat, hal ini dapat membantu mengurangi beban fiskal yang terlalu berat pada pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah memiliki lebih banyak sumber daya untuk membiayai kebutuhan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur tanpa harus sangat menaikkan pajak daerah.

Dana Alokasi Umum (DAU) ini termasuk dalam dana kompensasi atau dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan ke daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah sebagai bagian dari pelaksanaan desentralisasi dari DAU dan DAK (Baldrice, 2015). Ichi et al (2021) dalam penelitiannya bahwa ketika Dana Alokasi Umum meningkat maka kemungkinan terjadi penurunan *fiscal stress* karena DAU dapat membantu suatu daerah terhadap pendapatan daerah dalam menutupi kekurangan belanja.

2.2.3. Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan *Fiscal Stress*

PDRB dapat mewakili kemampuan suatu daerah untuk mengelola sumber daya alamnya. Oleh karena itu, besaran dari pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan oleh masing-masing negara atau daerah sangat bergantung pada potensi sumber daya alam yang dimiliki dan faktor produksi daerah tersebut. Tingkat pertumbuhan ekonomi bervariasi menurut wilayah karena keterbatasan dalam menyediakan berbagai faktor-faktor. Untuk menghasilkan barang dan jasa, membutuhkan komoditas lain yang disebut faktor produksi. Total nilai barang dan

jasa yang diproduksi di suatu wilayah tertentu selama periode waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) wilayah tersebut.

Dalam penelitian Dwitayanti et al (2019) mengungkapkan bahwa melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah sehingga pertumbuhan ekonomi yang diukur melalui PDRB memiliki pengaruh terhadap *fiscal stress*, dalam hal ini pengaruh tersebut mengakibatkan adanya perubahan dari penerimaan daerah yang akan menyebabkan perubahan pada tingkat *fiscal stress* yang dialami oleh daerah tersebut. Saragih (2003) menjelaskan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang maka semakin besar kemampuannya untuk membayar pajak yang ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam konsep makro, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang dicapai, maka semakin tinggi pula potensi pendapatan daerah. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat meningkatkan pendapatan pemerintah melalui pajak dan pengurangan pengeluaran sosial, dalam hal ini dapat mengurangi *fiscal stress* pada suatu daerah. Hal ini dipertegas oleh hasil penelitian Syifa, A., et al (2021) bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan produk domestik regional bruto akan diikuti oleh penurunan *fiscal stress*.

2.3. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini beberapa penelitian terdahulu yang terkait dan inspirasi dari variabel-variabel yang diteliti dan korelasinya dalam menjelaskan fenomena *fiscal Stress*. Dari studi ini inspirasi utama adalah Arnett (2011), Shamsub & Akoto (2004), Hevesi (2006) dan Muda (2016). Implikasi penelitian Arnett (2011) bahwa masih terdapat sedikit wilayah yang dilakukan dalam jangka

pendek untuk mengurangi *fiscal stress*. Namun, dengan menyeimbangkan pengeluaran dan pendapatan daerah dapat menyesuaikan diri menghadapi penurunan ekonomi berikutnya dengan tingkat tekanan fiskal yang lebih rendah. Shamsub & Akoto (2004) menyimpulkan bahwa kondisi ekonomi, siklus bisnis, dan pertumbuhan ekonomi berkontribusi terhadap terjadinya tekanan fiskal. Pengeluaran agregat yang tinggi dikaitkan dengan tekanan fiskal yang tinggi, pemerintah negara bagian dan lokal terlalu berkomitmen pada kategori kesejahteraan sosial, diversifikasi pendapatan daerah dikaitkan dengan tekanan fiskal yang rendah dan desentralisasi fiskal dikaitkan dengan tekanan fiskal yang rendah. Adapun kajian Hevesi (2006) menyimpulkan bahwa kondisi keuangan yang sulit di suatu wilayah terkait dengan tren demografis, kapasitas sumber daya dan basis pajak dapat menurun pada saat yang sama dan pengeluaran kebutuhan akan layanan sosial meningkat dapat menyebabkan meningkatnya tekanan fiskal.

Skidmore & Scorcone (2011) dalam penelitiannya dengan judul "*Cause and Consequences of Fiscal Stress in Michigan Cities*" mengkaji perkembangan keuangan pemerintah daerah setelah krisis khususnya di Kota Michigan yang banyak mengalami tekanan fiskal yang signifikan dan berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah analisis regresi *balanced panel*. Dalam penelitiannya meninjau pola pengeluaran pembangunan berupa pelayanan publik dengan menggunakan data sebagian besar di Kota Michigan periode 2005-2009. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pengeluaran dalam kategori pemerintah umum dan pelayanan publik berpengaruh terhadap *fiscal stress*.

Penelitian oleh Wang, Xiaohu, et al. (2007) dalam penelitiannya berjudul "*Measuring Financial Condition: A Study of U.S. States*" yang menguji ukuran

kondisi keuangan dengan menggunakan *government-wide* berdasarkan ukuran terdiri dari empat kondisi keuangan dimensi dalam kas, anggaran, solvabilitas jangka panjang dan tingkat layanan, dan indikator kondisi keuangan. Hasil menunjukkan bahwa ukuran relative dan valid bahwa informasi di seluruh pemerintah memberikan kerangka pelaporan keuangan yang baik untuk menilai kondisi keuangan suatu pemerintahan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ahsanova (2019) dengan judul “Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Belanja Pegawai dan Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress*: Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2017.” Menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap *fiscal stress* pada 29 Pemerintah Provinsi di Indonesia periode 2015-2017. Metode penelitian ini adalah regresi data panel dengan menggunakan data sekunder. Dari hasil penelitian yang dilakukan variabel belanja pegawai dan belanja modal berpengaruh positif terhadap *fiscal stress* pada pemerintah provinsi di Indonesia periode 2015-2021.

Sari, G (2020) dalam penelitiannya dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal Terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.” Adapun analisis data pada penelitian ini menggunakan Regresi Linear Berganda data *time series* periode 2008-2018 dengan metode OLS. Hasil penelitian baik secara parsial maupun simultan menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Modal memiliki pengaruh signifikan positif terhadap *Fiscal Stress* di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 2008-2018.

Nurhayati, N (2020) dalam penelitiannya dengan judul “*Analisis of Factor Affecting Fiscal Stress in Local Government (Case Studies ini Districts Kunci Bersama Areas for the Periode of 2015-2019).*” Pada penelitian ini dilakukan

pengamatan sebanyak 45 data dari 9 laporan keuangan Kabupaten/Kota dengan metode analisis pool. Adapun hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal mempengaruhi *fiscal stress*. PAD secara parsial berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*, sedangkan belanja modal berpengaruh positif terhadap *fiscal stress* periode 2015-2019.

Lhutfi et al (2020) dalam penelitiannya berjudul “*Do the Growth of Original Local Government Revenues and the Growth of Capital Expenditure Affect Fiscal Stress.*” Penelitian yang dilakukan pada 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2013-2016. Dalam penelitiannya menggunakan pendekatan baru yaitu mengukur *fiscal stress* dengan menerapkan rumus kapasitas fiskal dengan metode analisis data panel. Adapun hasil penelitian diperoleh bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress*. Sedangkan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress* di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat periode 2013-2016.

Iciah et al (2021), meneliti tentang pengaruh Belanja Modal, DAU, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap *fiscal stress* pada 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat periode 2015-2019. Metode penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data panel. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan didapatkan bahwa variabel Belanja Modal berpengaruh positif signifikan terhadap *fiscal stress*. Sedangkan DAU dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap *fiscal stress* di 27 Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2015-2019.

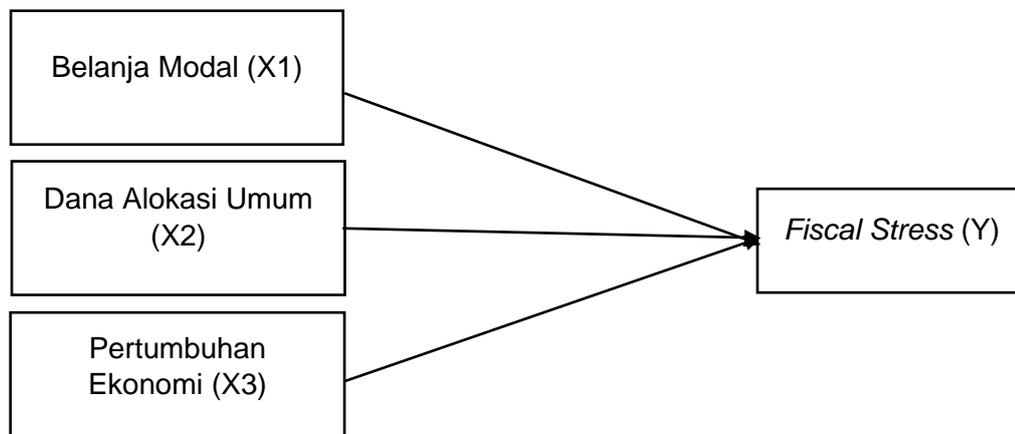
Syifa, A., et al (2021) dalam penelitiannya berjudul “*Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Fiscal Stress Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.*” Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode

deskriptif dan metode verifikatif. Teknik analisis yang digunakan adalah data panel pada periode 2016-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif signifikan terhadap *Fiscal Stress*.

2.4. Kerangka Pikir Penelitian

Disadari bahwa saat ini distribusi pelayanan publik belum meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah harus mampu secara mandiri mendanai barang dan pelayanan publik dengan menarik aliran pendapatan daerah yang potensial, diikuti dengan penganggaran yang cermat. *Fiscal Stress* atau tekanan keuangan terjadi ketika pendanaan pemerintah gagal untuk menyediakan barang dan layanan publik yang dibutuhkan masyarakat. Perangkat kebijakan fiskal di tingkat daerah dengan mengamati Belanja Modal, pengalokasian Dana Alokasi Umum ke pemerintah daerah, pertumbuhan ekonomi dan meninjau peningkatan produktivitas masyarakat daerah dapat memprediksi, mengendalikan, dan bahkan mengurangi tingkat *fiscal stress*.

Berdasarkan pemaparan kajian literatur, maka kerangka pikir penelitian yang dapat dikembangkan adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir Penelitian

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel bebas atau variabel independen yaitu Belanja Modal (X1), Dana Alokasi Umum (X2), dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) yang mempengaruhi variabel dependen *fiscal stress* (Y) pada kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan studi terdahulu, maka diketahui bahwa Belanja Modal, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh pada *fiscal stress* yang diukur dari pajak perkapita yang kemudian dikonversi dengan nilai z-score.

2.5. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara untuk penelitian rumusan masalah. Dimana rumusan pertanyaan penelitian yang dijelaskan dan dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawabannya berdasarkan teori dan bukan dari penelitian (situasi sesungguhnya). Dengan demikian, hipotesis yang dapat dirumuskan berdasarkan pemaparan kajian di atas adalah sebagai berikut:

1. Diduga Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress* kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress* kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Diduga Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif terhadap *fiscal stress* kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan.